

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- , 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asy'ari, Syukri, Hilipito, Meyrinda Rahmawaty, dan Ali, Mohamad Mahrus, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Fuady, Munir 2017, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gaffar, Janedjri M., 2009, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Helmi, Efran, 2012, *Filfasat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.

- Juwana, Hikmahanto, *Solusi Pasca Pemailitan PT IDI*, dalam Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalm Hukum Kepailitan di Indonesia, Total Media Yogyakarta, 2008.
- Kartono, 1974, "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh.
- Rithi, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan"Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan"*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Kencana, Jakarta.
- Siahaan, Maruar, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Ed. 2, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta.
- , dan Mamudji, Sri 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2019, *Penantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

- Soemitro, Ronny Hanintjo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 57.F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Depok.
- Sutedy, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suyatno, Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Tumbuan, Fred B.G., dan Lontoh, Rudy, 2001, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No 1 Tahun 1998 dalam penyelesaian utang piutang melalui pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Wijayanta, Tata., 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

- Ambiri, F. Yudhi Priyo, *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU*, Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro Jilid 49 Nomor 1, Januari 2020.
- Budiyono, Tri, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi COVID-19: Antara Solusi Dan Jebakan*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 50, Nomor 3, Juli 2021.
- Harsono, Ivan dan Prananingtyas, Paramita, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*, Jurnal Notarius Universitas Diponegoro Volume 12 Nomor 2, Desember 2019.
- Iriantoro, Catur, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 3, November 2015.
- Isra, Saldi, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 3, September 2014.

- Pambudi, Lintang Ario, *Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Bentuk Restrukturisasi Utang Di Indonesia*, Jurnal Idea Hukum Universitas Jenderal Soedirman Volume 7 Nomor 2, 2021.
- Putra, Antoni, *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*, Jurnal Yudisial Volume 1, Nomor 3 halaman 29, Desember 2021.
- Putriyanti Erma Defiana dan Tata Wijayanta, *Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 22, No. 3 Oktober 2010
- Ridlwan, Muhammad Pasca Zaky Muhajir, *Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal*, Notaire Volume 2 Nomor 1, Juli 2019.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Atmaja, Aldio Fahrezi Permana, *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd'*, Jurnal Ius Constituendum Volume 6 Nomor 2, Oktober 2021.
- Taiquddin, Habibul Umam, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*, JISIP Volume 1 Nomor 2, November 2017.
- Wijayanta, Tata, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang Undang No 37 Tahun 2004*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 26, No. 1, Februari 2014.
- , *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Perniagaan Lain Berdasarkan Undang Undang No 37 Tahun 2004*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 20 No. 2, Juni 2008.
- , *Perkembangan Perbedaan Pendapat (Disenting Opinion) Dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 19, No. 3, Oktober 2007.
- , *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 22, No. 2, Juni 2010.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Anggraini, Novi Dwi, 2020, *Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perdamaian Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Debitor (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 1/PDT.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Juncto Nomor: 5/PDT.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Janitra, Ignatius, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Insolvensi Pada Studi Kasus Perkara No. 707K/Pdt.sus Jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Jakarta Pusat Tanggal 29 Juni 2020*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

Nora, Silfia Afria, 2020, *Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Harta Kekayaan Debitor PT Stareast Sejahtera Group (Studi: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 5/pdt.sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.mdn. jo. Nomor 11/pdt.sus-PKPU/2017/PN Niaga.Mdn*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan & Surat Edaran Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Diundangkan di Jakarta pada 18 Oktober 2004. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 untuk Penjelasannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Diundangkan di Jakarta pada 13 Agustus 2003. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4316 untuk Penjelasannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Oleh PT Sarana Yeoman Sembada Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2021.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, Perihal Permohonan PKPU Oleh Sudardja Leman, Mikhael Suharso ST, Mahpudin H.Kamad Satir Terhadap PT Daya Guna Lancar, 8 Desember 2021.

Putusan Mahkamah Agung No 1714 K/Pdt.Sus-Pailitt/2022, Perihal Kasasi Edwin Heryadin Terhadap PT. Bhadra Samudra Indah, 13 Desember 2022.

F. Wawancara

Hanindy, Heru, 2023, Peluang Dan Tantangan: Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021), Wawancara, Jakarta, 5 Juli 2023.

Purba, Jamaslin James, 2023, Peluang Dan Tantangan: Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021), Wawancara Melalui Surat Elektronik, Jakarta, 22 Juni 2023.

Rachman, Irfan Nur, 2023, Peluang Dan Tantangan: Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021), Wawancara, Jakarta, 6 Juli

Wibawani, Susanti Arsi, 2023, Peluang Dan Tantangan: Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021), Wawancara, Jakarta, 14 Juni.

Wibisana, Yudhi, 2023, *Peluang Dan Tantangan: Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021)*, Wawancara, Jakarta, 13 Juni.